

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahman, Eeng dan Epi Indriyani, 2007, *Membina Kompetensi Ekonomi*, Grafindo Media Pratama, Bandung.
- Basah, Sjachran, 1998, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya.
- Malano, Herman, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Marsyahrul, Tony, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwadarminta, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soehino, 1984, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudirjo, Prajudi Atmo, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sukwiaty, Sudirman Jamal, dan Slamet Sukamto, 2002, *Ekonomi Yudistira*, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, HAW., 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zubir, Ismail, 2000, *Zoning Regulation: Instrumen yang Diperlukan Dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang*, BKPRN, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan.

Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015.

C. Sumber Lainnya

<http://dilihatya.com/2411/pengertian-implikasi-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 13/10/2015 pada pukul 00:27.

<http://detiklampung.com/berita-2741-bila-skpd-kompak-dan-kerja-keras-pad-meningkat.html> diakses pada tanggal 12 /01/2015 pada pukul 09:19.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi#cite_note-1, diakses pada tanggal 12/03/2015 pukul 22:18.